

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelola aset BMN pada Kantor Pusat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelola aset memiliki kompetensi SDM yang baik, hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan atau hanya memberikan pengaruh yang tidak besar terhadap peningkatan pada kinerja pengelola aset,

Namun Kementerian Kesehatan dapat menambahkan pelatihan pelatihan terkait pengelolaan aset BMN dengan melibatkan Kementerian Keuangan sebagai pengelola barang dan pelatihan terkait sikap dan perilaku dalam pekerjaan dengan harapan akan meningkatkan kinerja pegawai dari sisi kompetensi teknis, manajemen dan sosial kultural nya

2. Kompensasi finansial tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja pengelola aset BMN pada Kantor Pusat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dapat disimpulkan meskipun pengelola aset diberikan kompensasi finansial yang besar dan memadai, hal tersebut tidak memberikan pengaruh signifikan atau hanya memberikan pengaruh yang tidak besar terhadap peningkatan kinerja pengelola aset.

Namun Kementerian Kesehatan dapat meningkatkan kinerja pengelola aset dari pemberian penghargaan dari level unit utama atau Eselon 1 setiap triwulanan atau semesteran yang memilih pemenang dari masing-masing Satuan kerja dilingkungan Eselon I serta menjadikan pemenang sebagai calon nominasi yang didaftarkan ketingkat Kementerian Kesehatan bersaing antar perwakilan Eselon I, hingga tingkat Kementerian Kesehatan, bahkan bila dapat memberikan usulan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan

agar mengadakan pemberian pengharagan rutin setiap tahun kepada pengelola aset BMN di tingkat Kementerian / Lembaga makan pemenang di Kementerian Kesehatan dapat menjadi wakil Kementerian yang akan bersaing dlaam pengelolaan aset dengan perwakilan Kementerian / Lembaga lainnya,

3. Manajemen aset sangat mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja pengelola aset BMN pada Kantor Pusat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dengan demikian nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin baik penerapan pada manajemen aset yang dirasakan oleh pengelola aset, maka akan semakin baik pula kinerja pengelola aset tersebut tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan alat bantu berupa tools atau system secara kmputerisasi pada era 4.0 dan digitalisasi ini sangat berperan dalam manajemen aset, dikarenakan dengan adanya sumber daya yang mumpuni tanpa didukung dengan saran dan prasaran yang kurang memadai maka akan membuat kinerja pengelolaan aset secara global akan menurun. Dapat kita lihat saat ini segala sesuatu mengandalkan perangkat computer beserta tool nya yang snagat membantu pegawai dalam melaksanakan tugas nya. Dan kemajuan teknologi saat ini sangat pesat dan diikuti oleh semua organisasi bahkan Kementerian / Lembaga dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Negara, Kementerian Keuangan sendiri telah mengeluarkan banyak tools dan aplikasi sebagai alat bantu muali dari pelaporan hingga pengelolaan yang memudahkan kementerian / lembaga.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil simpulan, maka saran dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Instansi Kantor Pusat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
 - a. Kompetensi SDM

Hasil penelitian bahwa kompetensi SDM tidak terbukti dapat mempengaruhi kinerja. Maka peneliti memberikan saran bahwa hendaknya instansi Kementerian Kesehatan perlu mempertahankan

bahkan meningkatkan kompetensi yang telah dicapai oleh para pegawai dari sisi pendidikan, pengetahuan, tata cara pengelolaan barang hingga manajemen kepemimpinan, serta menanamkan arti penting dalam mematuhi norma-norma yang berlaku dalam instansi tersebut, serta bagi pengelola aset hendaknya mempertahankan sikap yang selalu menaati setiap aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku dalam instansi tersebut, di karenakan pegawai yang mampu menjaga dan mematuhi setiap aturan yang berlaku akan berdampak kepada hasil kerja mereka. Satuan Kerja juga dapat secara internal meningkatkan kualitas pengelola asset BMN maupun penyiapan SDM baru yang siap bekerja sesuai kompetensinya dengan cara menyiapkan anggaran khusus keikutsertaan pelatihan terkait pengelolaan BMN yang sering diadakan oleh pusat pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian, sementara pada tingkat Kementerian Kesehatan dalam melakukan pembinaan terhadap pengelola BMN pada lingkungan satuannya dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan Kursus singkat baik yang diadakan internal kementerian maupun yang diadakan oleh instansi terkait. Selain mendapatkan ilmu pengetahuan dan penerapan dilapangan, pegawai juga mendapatkan sertifikat yang dapat menjadikan salah satu tambahan syarat kenaikan pangkat pada jabatan fungsionalnya.

Dengan banyaknya pelatihan dan kursus yang spesifik pengelolaan BMN maka diharapkan kompetensi SDM pengelola BMN menjadi lebih baik lagi dan jenjang regenerasi dapat dilakukan secara terencana sehingga dapat diciptakan pengelola BMN yang unggul

b. Kompensasi finansial

Pemberian kompensasi bagi pegawai di Kementerian Kesehatan yang tidak berpengaruh secara signifikan pada kinerja pengelola asset BMN dikarenakan secara penerimaan finansial telah diatur secara umum oleh Kementerian Keuangan, namun penambahan kompensasi finansial dapat dilakukan mulai dari tingkat terkecil yaitu satuan kerja

dengan cara melibatkan pengelola BMN ke dalam kegiatan teknis yang berhubungan dengan penggunaan barang inventaris kantor sehingga pengelola barang mendapatkan kompensasi finansial berupa perjalanan dinas dan dapat secara langsung mengetahui Pemanfaatan barang tersebut, misalnya pengadaan alat belajar mengajar yang diusulkan oleh bidang teknis pengajar pendidikan dan dicatat oleh pengelola BMN pada pusdiklat PPSDM yang pada saat dialihkan kepada Poltekkes di daerah, pengelola barang diajak serta pada saat penyerahan barang tersebut sehingga pengelola tersebut dapat mengetahui secara fisik pemanfaatan barang dan mendapatkan juga kompensasi finansial berupa anggaran perjalanan dinas.

Sementara pada tingkat Kementerian Kesehatan dapat menambahkan apresiasi berupa reward atau penghargaan secara individual dan instansi yang dilombakan mulai dari level Eselon I yang pesertanya satuan kerja di dalam Eselon I tersebut kemudian masing masing pemenang menjadi perwakilan Eselon I yang dilombakan pada tingkat Eselon I hingga pemenang dari tingkatan tersebut menjadi wakil Kementerian Kesehatan sampai pada level antar Kementerian / Lembaga dimana pemenang akan mendapatkan award yang sangat bergengsi serta dipandang oleh internal kementerian itu sendiri dan kementerian lain yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja pengelola aset secara bersamaan dari level Pimpinan hingga pelaksana.

c. Manajemen Aset

Di era 4.0 dan digitalisasi saat ini, Kementerian Kesehatan harus bisa meningkatkan pengelolaan asset BMN nya baik secara internal maupun eksternal melalui peningkatan manajemen asset, karena pada saat ini pengelolaan secara digital sangat berperan dalam mengurangi resiko kesalahan manusia atau *human error* serta pelaporan pertanggung jawaban pengelolaan barang maupun keuangan pemerintah telah menggunakan aplikasi dan system secara online, hal ini dikarenakan pelaporan pada suatu kementerian dilakukan dari lever

terkecil yaitu pelaporan barang unit satuan kerja yang dikompilasi oleh Eselon I menjadi pelaporan barang unit Eselon I dilanjutkan kompilasi oleh tingkat kementerian yang dijadikan sebagai pelaporan barang tingkat Kementerian untuk memperoleh opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Peningkatan manajemen asset dapat dilakukan dengan pengembangan *tools* atau alat bantu berupa aplikasi atau system online terutama menu peringatan dini (*early warning system*) yang *real time* dan terintegrasi dan terkoneksi secara berjenjang mulai dari internal satuan kerja dimana pengelola barang dalam melakukan pencatatannya sudah ke dalam aplikasi secara berkala dan *real time* dapat di monitor oleh atasan langsung serta secara berjenjang data BMN dapat ditarik oleh Eselon I yang berguna sebagai bahan kompilasi pada saat pelaporan berkala terkait BMN lingkup Eselon 1 hingga level Kementerian karena setiap kelalaian maupun kesalahan dalam pengelolaan asset bmn dari tingkat petugas BMN kan mempengaruhi hingga tingkat Kementerian. Dalam manajemen asset tersebut harus tersedia peringatan dini (*Early warning system*) yang diterapkan di Kementerian Kesehatan agar dapat meminimalisir temuan temuan baik material maupun immaterial terkait pengelolaan barang milik Negara.

Peringatan dini yang mendesak pada Kementerian Kesehatan sesuai fakta dilapangan adalah:

- 1) Peringatan dini atas penetapan penggunaan asset setelah diterima oleh satuan kerja dimana 6 bulan setelah dicatat dalam SIMAK BMN wajib dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) oleh satuan kerja.
- 2) Peringatan dini pada saat pemanfaatan asset dalam hal jangka waktu pemanfaatan oleh pihak lain misalkan sewa ruangan selama 1 tahun, maka dalam jangka waktu 3 bulan sebelum berakhir masa sewa akan ada peringatan dini agar satuan kerja mengingatkan

penyewa untuk mengajukan permohonan kembali bila sewa dilanjutkan,

- 3) Peringatan dini terkait penghunian rumah negara dalam hal jangka waktu penghunian oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberikan hak untuk menggunakan rumah negara yang dibatasi selama 3 tahun dan penghuni wajib berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif. Hal ini untuk menghindari penghunian rumah negara yang tidak berhak dari status kepegawaian yaitu Pegawai Negeri Sipil aktif belum pensiun dimana setiap 3 bulan sebelum masa penghunian berakhir, satuan kerja akan meminta penghuni untuk melakukan permohonan penghunian kembali, hingga monitoring kondisi fisik rumah negara selama di huni.

Secara keseluruhan, peringatan dini tersebut digunakan pada barang yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan di lingkungan satuan internal satuan kerja Kementerian Kesehatan.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Analisis Kinerja Pengelola Aset BMN Pada Kantor Pusat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia“ ada beberapa masukan dan saran yang sebaiknya perlu dicermati dan di perhatikan, antara lain:

- a. Pada Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat memberikan kajian lebih banyak sumber referensi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Pengelola Aset BMN di instansi lainnya, agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.
- b. Apabila akan dilakukan penelitian lebih dalam, maka agar lebih dipersiapkan pada hal hal yang kemungkinan dapat terjadi, dalam hal ini adanya masa pandemic covid-19, sehingga pada saat metode pengambilan data dan proses penelitian dapat dilaksanakan lebih akurat dan lebih baik lagi. Guna memperbanyak perolehan data dan informasi dalam mengkaji Analisis Kinerja Pengelola Aset BMN,

dapat ditambahkan metode wawancara dengan para pakar yang ahli dibidangnya.

5.3 Keterbatasan Penulisan

Penelitian ini telah disusun dan dilaksanakan dengan secara optimal dan maksimal sesuai dengan urutan proses penelitian untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya, namun dalam prosesnya masih ada beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Kompetensi SDM, kompensasi finansial dan manajemen aset adalah hal yang diasumsikan berpengaruh pada Kinerja Pengelola Aset dalam penelitian ini, sementara itu masih terdapat banyak hal yang dapat berpengaruh pada Kinerja Pengelola Aset.
2. Metode kuesioner pada suatu penelitian ada kalanya memperoleh hasil yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan karena kondisi responden sangat mempengaruhi jawaban tersebut.